

## Implementasi SAK Entitas Privat dan Implikasinya Terhadap Prosedur Audit: Perspektif Auditor

**I Kadek Jonh Stiawan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Januari 12, 2026

Revised Januari 23, 2026

Accepted Januari 26, 2026

#### Kata Kunci:

SAK Entitas Privat,  
Prosedur Audit,  
Auditor

#### Keywords:

*Financial Accounting Standard  
for Private Entities,  
Audit Procedures,  
Auditor*

### ABSTRAK

Pemberlakuan SAK EP membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan entitas privat yang berdampak langsung pada praktik audit. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menuntut auditor untuk menyesuaikan prosedur audit yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAK EP dari perspektif auditor serta mengkaji implikasinya terhadap penilaian risiko audit, perencanaan audit, pengujian substantif, dan evaluasi pengendalian internal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan auditor yang menangani audit entitas privat, serta didukung oleh dokumentasi dan telaah standar akuntansi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EP meningkatkan kompleksitas audit, sehingga mendorong penerapan audit berbasis risiko secara lebih intensif melalui perencanaan audit yang lebih rinci, pengujian substantif yang lebih mendalam, serta evaluasi pengendalian internal yang lebih ketat. Meskipun meningkatkan beban kerja dan waktu audit, penyesuaian prosedur tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas audit dan keandalan laporan keuangan entitas privat.

### ABSTRACT

*The implementation of SAK EP has introduced changes in the recognition, measurement, and disclosure of private entities' financial statements, which directly affect audit practices. These changes not only influence the preparation of financial statements but also require auditors to adjust the audit procedures applied. This study aims to analyze the implementation of SAK EP from the auditor's perspective and to examine its implications for audit risk assessment, audit planning, substantive testing, and the evaluation of internal control. The study adopts a qualitative approach using a descriptive exploratory method. Data were collected through in-depth interviews with auditors involved in private entity audit engagements, supported by documentation and a review of relevant accounting standards. The findings indicate that the implementation of SAK EP increases audit complexity, thereby encouraging a more intensive risk-based audit approach through more detailed audit planning, enhanced substantive testing, and stricter evaluation of internal control. Although it increases audit workload and audit time, these procedural adjustments contribute to improved audit quality and greater reliability of private entities' financial statements.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

I Kadek Jonh Stiawan  
Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia  
Email: jonhstiawan@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia terus mengalami penyesuaian guna meningkatkan kualitas, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang efektif menggantikan SAK ETAP [1]. SAK EP dirancang untuk memberikan pedoman pelaporan keuangan yang lebih sederhana namun tetap andal bagi entitas privat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Penyusunan SAK EP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas swasta, di mana entitas tersebut tidak bertanggung jawab kepada publik, sehingga publikasi laporan ditujukan untuk masyarakat umum [2]. Komponen laporan keuangan menurut SAK EP yakni laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif atau laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan [3].

SAK EP dirancang dengan meniadakan pengaturan atas topik-topik yang dinilai kurang relevan bagi entitas privat, seperti laba per saham, pelaporan keuangan interim, dan pelaporan segmen operasi. Selain itu, standar ini juga menyederhanakan pilihan kebijakan akuntansi dengan membatasi alternatif perlakuan akuntansi, sehingga entitas privat diarahkan untuk menggunakan satu kebijakan akuntansi yang seragam atas transaksi tertentu. Penyederhanaan tersebut mencakup aspek pengakuan dan pengukuran yang lebih ringkas, persyaratan pengungkapan yang lebih terbatas, serta penggunaan bahasa standar yang lebih sederhana dan mudah dipahami [4].

Penerapan SAK EP membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan entitas privat. SAK EP memperkenalkan sejumlah penyempurnaan dibandingkan SAK EP antara lain panduan lebih rinci terkait pajak tangguhan, imbalan kerja, laporan keuangan konsolidasian, revaluasi asset serta instrumen keuangan [5]. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada manajemen dan penyusun laporan keuangan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap proses dan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Auditor dituntut untuk memahami substansi standar baru agar dapat merancang prosedur audit yang sesuai, menentukan risiko salah saji material, serta mengevaluasi kewajaran laporan keuangan berdasarkan kerangka pelaporan yang berlaku [6].

Dalam praktiknya, implementasi SAK EP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman entitas terhadap standar baru, ketidaksiapan dokumentasi pendukung, serta perbedaan interpretasi atas ketentuan SAK EP [7]. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penilaian risiko audit, perencanaan audit, serta pelaksanaan prosedur audit substantif dan pengujian pengendalian. Oleh karena itu, peran auditor menjadi semakin krusial dalam memastikan bahwa penerapan SAK EP telah sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak menimbulkan salah saji material dalam laporan keuangan. Dari sudut pandang auditor, implementasi SAK EP dapat menuntut penyesuaian terhadap pendekatan audit yang selama ini digunakan, khususnya pada entitas yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP. Auditor perlu mengevaluasi kembali kebijakan akuntansi klien, menyesuaikan prosedur pengujian, serta meningkatkan profesionalisme dan skeptisisme profesional dalam menanggapi perubahan standar [8]. Persepsi auditor terhadap SAK EP menjadi faktor penting karena akan memengaruhi kualitas pertimbangan profesional dan efektivitas prosedur audit yang diterapkan.

Riset terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) memberikan dampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Salman dan Sutisna (2025) menemukan bahwa implementasi SAK EP mampu meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan konsistensi laporan keuangan [9]. Sementara itu, Maulana et al. (2023) mengidentifikasi bahwa perubahan utama akibat penerapan SAK EP terletak pada perlakuan akuntansi atas investasi pada entitas anak dan asosiasi, imbalan kerja dan pascakerja, serta pengakuan pajak tangguhan [10]. Temuan serupa dikemukakan oleh Madaharsa dan Muslimin (2025) yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aspek keuangan, khususnya terkait pajak tangguhan, tunjangan karyawan, revaluasi aset, serta penurunan nilai persediaan dan piutang [5]. Namun demikian, penelitian Aprilia et al. (2025) menegaskan bahwa implementasi SAK EP belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat ketidaklengkapan pengungkapan, khususnya pada penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) [11]. Di sisi lain, Khairiyah et al. (2024) menemukan bahwa penerapan SAK pada Koperasi telah sesuai dengan standar sebelumnya (SAK ETAP), menunjukkan adanya kesiapan entitas dalam beradaptasi dengan standar akuntansi berbasis entitas privat [12].

Meskipun penelitian mengenai implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) pada entitas privat telah banyak dilakukan, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek kepatuhan penyusunan laporan keuangan dan perubahan perlakuan akuntansi, sementara kajian yang secara spesifik menelaah implikasi penerapan SAK EP terhadap prosedur audit dari perspektif auditor masih relatif terbatas. Padahal, SAK EP sebagai standar baru yang bersifat *principle-based* menuntut tingkat pemahaman, profesional judgment, dan penyesuaian prosedur audit yang lebih kompleks dari auditor. Kondisi ini menjadi krusial mengingat kualitas audit dan keandalan opini audit sangat ditentukan oleh kemampuan auditor dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan standar akuntansi secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbaruan dengan mengintegrasikan perspektif auditor dalam mengkaji implementasi SAK EP serta menganalisis implikasinya terhadap perencanaan audit, penilaian risiko, dan pelaksanaan prosedur audit. Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan pemberlakuan efektif SAK EP secara penuh, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur audit dan standar akuntansi, serta kontribusi praktis bagi auditor, entitas privat, dan regulator dalam memperkuat kualitas penerapan SAK EP dan praktik audit di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi SAK EP ditinjau dari perspektif auditor dan implikasinya terhadap prosedur audit yang dilakukan oleh auditor.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam implementasi SAK EP serta implikasinya terhadap prosedur audit dari perspektif auditor. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai persepsi, pengalaman, dan pertimbangan profesional auditor dalam menghadapi penerapan standar akuntansi yang relatif baru. Subjek penelitian terdiri atas auditor yang menangani penugasan audit pada entitas privat, yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria pengalaman audit, pemahaman terhadap SAK EP dan keterlibatan langsung dalam proses audit laporan keuangan entitas privat.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan auditor, didukung dengan dokumentasi berupa kertas kerja audit serta telaah terhadap standar akuntansi dan pedoman audit yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif guna mengidentifikasi pola persepsi auditor, bentuk penyesuaian prosedur audit, serta tantangan dan risiko audit yang muncul akibat penerapan SAK EP. Keabsahan data dijaga melalui teknik

triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang temuan kepada informan, sehingga kredibilitas dan keandalan hasil penelitian dapat terjamin.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi SAK EP dari Perspektif Auditor**

Berdasarkan hasil wawancara, auditor secara umum memahami prinsip-prinsip dasar SAK EP termasuk pengakuan pendapatan, persediaan, dan penyajian laporan keuangan entitas perdagangan. Pemahaman ini menjadi dasar bagi auditor untuk menilai kepatuhan entitas terhadap standar. Namun, auditor juga menyatakan bahwa karena SAK EP merupakan standar yang relatif baru, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada pos-pos akuntansi yang bersifat estimatif atau kompleks. Salah satu contoh yang menjadi fokus perhatian auditor adalah imbalan pasca kerja. Bapak JS seorang auditor berpengalaman menjelaskan bahwa:

“... perhitungan imbalan pasca kerja tidak sekedar jumlah gaji karyawan. Auditor harus menilai asumsi aktuarial, tingkat diskonto dan masa kerja karyawan”.

Bapak JS menekankan bahwa pos ini menuntut auditor untuk tidak hanya memeriksa angka yang tercatat, tetapi juga memahami asumsi yang digunakan manajemen dan melakukan verifikasi silang terhadap dokumen pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa peran auditor menjadi lebih proaktif dalam memastikan kewajaran laporan keuangan. Rekan seprofesi beliau, Bapak WM menambahkan bahwa kendala terbesar muncul pada entitas perdagangan kecil, di mana perhitungan imbalan pasca kerja jarang diperbarui sesuai standar, sebagaimana yang tersaji pada kutipan wawancara berikut.

“... di beberapa entitas perdagangan kecil, perhitungan ini jarang diperbarui sesuai standar. Saya harus melakukan prosedur tambahan untuk menilai kewajaran liabilitas imbalan pasca kerja”.

Pernyataan ini menegaskan bahwa auditor harus menyesuaikan prosedur audit substantif dan evaluasi pengendalian internal untuk memastikan bahwa liabilitas yang diakui benar-benar mencerminkan kewajiban entitas sesuai SAK EP. Selain itu, pajak tangguhan juga menjadi salah satu pos yang menimbulkan tantangan bagi auditor. Standar baru mengatur pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan secara lebih rinci, terutama terkait perbedaan temporer yang muncul dari transaksi dan estimasi. Ibu FA, seorang auditor senior, menjelaskan:

“... banyak perusahaan belum sepenuhnya paham bagaimana menghitung pajak tangguhan sesuai standar baru ini. Kami harus mengecek perbedaan temporer yang timbul dari depresiasi, cadangan piutang, atau kewajiban kontinjensi”.

Dari perspektif auditor, pengujian pajak tangguhan tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga membutuhkan analisis kritis terhadap asumsi manajemen, serta penilaian konsistensi dengan standar baru. Auditor harus mengevaluasi apakah pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan sudah sesuai dengan SAK EP, dan apakah dokumentasi perusahaan cukup mendukung angka yang disajikan.

#### **3.2 Implikasi SAK EP terhadap Prosedur Audit**

Penerapan SAK EP yang baru memiliki pengaruh langsung terhadap prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan hasil wawancara, auditor menyatakan bahwa standar baru menuntut penyesuaian prosedur audit karena beberapa pos akuntansi menjadi lebih kompleks dan rawan risiko salah saji material. Dampak ini dapat dilihat dari tiga aspek utama prosedur audit yakni perencanaan audit, pengujian substantif, dan evaluasi pengendalian internal. Standar baru menuntut auditor untuk lebih cermat dalam merencanakan audit, terutama dalam menentukan area fokus dan alokasi sumber daya audit. Auditor harus mengidentifikasi pos-pos kompleks yang memiliki risiko tinggi, seperti imbalan pasca kerja, pajak tangguhan, cadangan persediaan, dan kewajiban kontinjensi. Seorang auditor (Bapak WM) menjelaskan sebagai berikut.

“... *karna* SAK EP ini baru, saya harus menyesuaikan rencana audit, memastikan fokus utama pada pos-pos estimasi seperti imbalan pasca kerja dan cadangan persediaan yang berisiko salah saji material”.

Auditor lainnya (Ibu FA) menambahkan bahwa standar baru membuat perencanaan audit menjadi lebih rinci, sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“... perencanaan audit menjadi lebih rinci. Saya harus menambahkan prosedur untuk memverifikasi asumsi manajemen dan dokumen pendukung yang sebelumnya tidak terlalu diperiksa”.

Penerapan standar baru memaksa auditor untuk meninjau ulang perencanaan audit secara menyeluruh. Pos-pos estimasi yang memiliki risiko tinggi menjadi titik perhatian utama, sehingga auditor harus menyesuaikan alokasi waktu, prosedur, dan sumber daya audit untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Standar baru menuntut pengujian substantif yang lebih rinci karena transaksi dan estimasi menjadi lebih kompleks. Seorang auditor (Bapak JS) menyampaikan pernyataan sebagai berikut.

“... pengujian substantif lebih rinci karena standar baru menuntut transparansi dan konsistensi perhitungan. Saya harus mengecek perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja dan aset pajak tangguhan dengan teliti”.

Kemudian rekan seprofesi (Bapak WM) menambahkan dampaknya terhadap waktu audit, sebagaimana dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“... audit *jadi* lebih memakan waktu, *soalnya* setiap estimasi yang berisiko tinggi harus diuji lebih mendalam dan didukung bukti dokumen yang lengkap”.

Pengujian substantif menjadi lebih intensif karena standar baru memperkenalkan kompleksitas tambahan pada pos-pos estimasi. Auditor harus memastikan setiap perhitungan, asumsi, dan dokumentasi sesuai dengan SAK EP, sehingga risiko salah saji material dapat diminimalkan. Selain penyesuaian perencanaan dan pengujian substantif, auditor juga menekankan pentingnya evaluasi pengendalian internal. Standar baru menuntut entitas memiliki sistem dan dokumentasi yang dapat mendukung perhitungan pos-pos kompleks. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu FA selaku auditor senior yang telah mendalami penerapan SAK EP.

“... saya memeriksa pengendalian internal lebih teliti. Karena standar baru, sistem dan dokumentasi perusahaan harus bisa mendukung perhitungan yang tepat. Jika tidak, saya menambah prosedur pengujiannya”.

Hal yang sependapat juga disampaikan oleh Bapak JS selaku auditor eksternal yang juga telah aktif dalam penugasan audit dengan menggunakan SAK ETAP, sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“... evaluasi pengendalian internal menjadi krusial. *kalo* pengendalian lemah, risiko salah saji meningkat, sehingga prosedur substantif juga harus ditingkatkan”.

Evaluasi pengendalian internal menjadi kunci untuk menilai apakah sistem dan prosedur perusahaan mampu mendukung penerapan standar baru. Kelemahan pengendalian internal dapat meningkatkan risiko salah saji, sehingga auditor perlu menambah prosedur substantif dan dokumentasi tambahan. Secara keseluruhan, auditor menilai bahwa penerapan SAK EP yang baru membawa tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan audit. Hal ini disebabkan oleh adanya pos-pos akuntansi yang bersifat estimatif dan membutuhkan penilaian profesional yang lebih mendalam, seperti liabilitas imbalan pasca kerja, pajak tangguhan, cadangan persediaan, dan kewajiban kontinjensi. Menurut Bapak WM salah seorang auditor yang berpengalaman, standar baru memang menuntut perhatian ekstra, tetapi jika prosedur audit disesuaikan dengan tepat, hal ini justru akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“... standar baru memang membuat audit lebih kompleks, *tapi* dengan prosedur yang tepat, laporan keuangan menjadi lebih andal dan transparan”.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kompleksitas tambahan yang muncul dari standar baru bukan semata-mata menjadi hambatan, melainkan menjadi kesempatan bagi auditor untuk meningkatkan ketelitian pengujian. Auditor perlu menyesuaikan prosedur, menambahkan pengujian substantif, dan mengevaluasi pengendalian internal secara lebih rinci agar setiap pos berisiko tinggi dapat diverifikasi dengan cermat. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak JS juga berpendapat bahwa perubahan dinamikan standar akuntansi dapat meningkatkan kualitas audit, sebagaimana tersaji dalam kutipan wawancara berikut.

“... audit memakan waktu lebih lama, *tapi* kualitasnya meningkat karena setiap pos berisiko tinggi diuji secara rinci”.

Penerapan SAK EP yang baru mempengaruhi prosedur audit secara menyeluruh. Auditor harus menyesuaikan perencanaan, pengujian substantif, dan evaluasi pengendalian internal untuk menghadapi kompleksitas dan risiko yang timbul dari standar baru. Dampak ini meningkatkan beban kerja, namun secara signifikan meningkatkan keyakinan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan.

### 3.3 Pembahasan

Teori akuntansi memandang pos-pos estimatif sebagai unsur laporan keuangan yang mengandung tingkat ketidakpastian masa depan yang tinggi dan sangat bergantung pada penggunaan asumsi manajerial yang signifikan. Pos-pos tersebut tidak dapat diukur secara pasti pada saat pengakuan awal, sehingga memerlukan pertimbangan profesional dalam menentukan nilai yang disajikan. Dalam konteks SAK Entitas Privat (SAK EP), karakteristik ini tetap dipertahankan meskipun standar dirancang lebih sederhana dibandingkan standar umum. Liabilitas imbalan pasca kerja, misalnya, dalam SAK EP tidak hanya merepresentasikan kewajiban pembayaran kepada karyawan, tetapi juga menuntut penilaian atas asumsi yang relevan, seperti masa kerja karyawan dan tingkat diskonto, untuk menentukan nilai kini kewajiban, sebagaimana diatur dalam ketentuan imbalan kerja [9]. Hal serupa berlaku pada pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak, di mana SAK EP mengharuskan entitas mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan secara konsisten dengan kerangka pengakuan dan pengukuran yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip internasional yang menekankan pengakuan pajak tangguhan berdasarkan perbedaan temporer.

Penerapan SAK EP pada pos-pos estimatif tersebut membawa implikasi penting terhadap praktik audit. Meskipun SAK EP bertujuan menyederhanakan pelaporan keuangan bagi entitas privat, standar ini tetap menuntut penggunaan pertimbangan profesional yang signifikan, sehingga meningkatkan risiko inheren pada laporan keuangan. Kompleksitas pengukuran dan pengungkapan pos estimatif dalam SAK EP secara langsung memengaruhi penilaian risiko audit dan prosedur audit yang harus dijalankan auditor [7]. Pemeriksaan audit tidak lagi cukup hanya berfokus pada angka yang tercatat atau bukti transaksi, tetapi juga harus mencakup evaluasi kewajaran asumsi manajemen, konsistensi metode perhitungan, serta kecukupan dan relevansi bukti audit pendukung. Kondisi ini sejalan dengan prinsip audit berbasis risiko (*risk-based auditing*) yang menekankan pentingnya fokus auditor pada area berisiko tinggi salah saji material serta perancangan prosedur audit yang memadai untuk mengidentifikasi dan merespons risiko tersebut secara efektif [10].

Pendekatan *risk-based audit* menjadi semakin relevan dalam konteks penerapan SAK EP karena standar ini memberikan fleksibilitas bagi entitas privat dalam menggunakan estimasi dan pertimbangan profesional. Fleksibilitas tersebut, di satu sisi, meningkatkan relevansi laporan keuangan, tetapi di sisi lain memperbesar potensi subjektivitas manajemen. Oleh karena itu, auditor perlu memusatkan perhatian pada area-area dengan tingkat risiko tertinggi agar sumber daya audit dapat dialokasikan secara lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan kualitas audit yang dihasilkan [11][13]. Pendekatan ini mendorong auditor untuk menyesuaikan strategi audit dengan karakteristik risiko yang melekat pada setiap pos laporan keuangan yang diatur dalam SAK EP.

Implikasi praktis dari penerapan SAK EP tercermin pada perencanaan audit yang menjadi lebih rinci dan terstruktur. Auditor dituntut untuk mengidentifikasi pos-pos estimatif yang material dan berisiko tinggi sejak tahap awal audit, kemudian menyesuaikan alokasi waktu serta sumber daya audit secara proporsional [14]. Pengujian substantif diperluas dan diperdalam pada pos-pos yang diatur dalam SAK EP, seperti imbalan pasca kerja dan pajak tangguhan, guna memverifikasi asumsi, metode perhitungan, serta dasar pengakuan yang digunakan manajemen. Evaluasi pengendalian internal juga memperoleh peran yang lebih penting untuk menilai apakah sistem dan prosedur pencatatan entitas privat mampu mendukung penerapan SAK EP secara konsisten. Evaluasi ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko audit, sehingga kelemahan pengendalian dapat diidentifikasi dan direspons melalui penambahan prosedur audit yang relevan.

Meskipun penerapan prosedur audit yang lebih intensif tersebut meningkatkan beban kerja auditor dan memperpanjang waktu pelaksanaan audit, pendekatan ini secara substansial meningkatkan keyakinan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan entitas privat. Pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap pos-pos estimatif serta pengujian substantif yang kuat memungkinkan auditor memberikan opini audit yang lebih andal dan transparan. Keterlibatan berkelanjutan auditor dalam suatu sektor industri spesifik memungkinkan mereka untuk lebih cepat mengidentifikasi serta menguasai pola transaksi yang rumit dan unik yang melekat pada sektor tersebut [15]. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi yang lebih komprehensif, termasuk SAK EP, meskipun menimbulkan tantangan dalam implementasi, berkontribusi pada peningkatan kualitas informasi keuangan dan penguatan pengendalian internal. Pendekatan audit berbasis risiko tidak hanya meningkatkan efisiensi audit, tetapi juga memperkuat integritas sistem pelaporan keuangan, sehingga mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan [16].

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK EP yang baru meningkatkan kompleksitas pelaporan keuangan dan berdampak langsung pada prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Pos-pos akuntansi yang bersifat estimatif dan kompleks, seperti imbalan pasca kerja, pajak tangguhan, cadangan persediaan, dan kewajiban kontinjensi, menjadi area utama yang berisiko salah saji material. Kondisi ini menuntut auditor untuk menyesuaikan perencanaan audit, memperdalam pengujian substantif, serta memperkuat evaluasi pengendalian internal. Meskipun penerapan SAK EP meningkatkan beban kerja dan waktu pelaksanaan audit, prosedur audit yang lebih rinci dan berbasis risiko terbukti meningkatkan keyakinan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan serta mendorong peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan entitas.

Berdasarkan hasil penelitian, auditor disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi profesional terkait penerapan SAK EP, khususnya pada pos-pos akuntansi yang bersifat estimatif dan kompleks. Auditor perlu menerapkan perencanaan audit berbasis risiko secara lebih mendalam, memperluas pengujian substantif terhadap asumsi manajemen, serta memperkuat evaluasi pengendalian internal guna meminimalkan risiko salah saji material. Selain itu, auditor diharapkan dapat menyesuaikan alokasi waktu dan sumber daya audit secara proporsional agar peningkatan kompleksitas akibat penerapan standar baru tidak mengurangi kualitas dan ketepatan pelaksanaan audit, melainkan justru meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan.

#### **REFERENSI**

- [1] I. A. Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat*. 2022.
- [2] N. K. Tanjung, L. Syafina, and Y. S. J. Nasution, "Analysis of the Implementation of Private Entity Financial Accounting Standards in the Presentation of Financial Statements of PT BPRS Puduarta Insani," *Amkop Manag. Account. Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 682–696, 2025, doi: 10.37531/amar.v5i2.3047.
- [3] Widyasari and A. E. Defin, "Penerapan S AK Entitas Privat u ntuk Penyusunan Laporan

- Keuangan,” *J. Pustaka Mitra*, vol. 5, no. 5, pp. 270–274, 2025.
- [4] A. Pranesti and T. Hanani, “Company Readiness in Applying Private Entity Financial Accounting Standards (Sak Ep): a Case Study of Regional Owned Enterprises (Bumd) in Yogyakarta,” *J. Ilm. Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 122–129, 2022, doi: 10.30640/akuntansi45.v3i2.590.
- [5] A. S. Madaharsa and Muslimin, “Analisis Implementasi Sak Etap Menjadi Sak Ep: Studi Komparatif Perusahaan Manufaktur Dan Jasa,” *RISTANSI Ris. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 270–286, 2025, doi: 10.32815/ristansi.v6i2.2681.
- [6] A. Johri and R. K. Singh, “A systematic literature review of Auditing Practices research landscape and future research propositions using bibliometric analysis,” *Cogent Bus. Manag.*, vol. 11, no. 1, p., 2024, doi: 10.1080/23311975.2024.2344743.
- [7] W. R. Ramadan and F. Nisa, “Analisis Dampak Transisi Dari SAK ETAP Ke SAK EP Terhadap Laporan Keuangan Dan Implikasinya Pada Perpajakan,” *J. Multidisiplin Ilmu Akad.*, vol. 2, no. 4, pp. 708–721, 2025, doi: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5948>.
- [8] F. Awaliyah and M. N. A. Birton, “Audit Judgment dan Kegagalan Risiko Deteksi,” *J. Akunt. dan Gov.*, vol. 6, no. 2, 2026, doi: 10.24853/jago.6.2.181-218.
- [9] K. R. Salman and E. Sutisna, “Implementasi SAK Entitas Privat ( SAK EP ) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Tahun 2024,” *J. Kemitraan dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 6, no. 1, pp. 18–25, 2025.
- [10] J. Maulana, M. Marismiati, and G. Wirakanda, “Analisis Penerapan Sak Entitas Privat (Sak Ep) Pada Laporan Keuangan Koperasi Xyz,” *L. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 101–107, 2023, doi: 10.47491/landjournal.v4i1.2985.
- [11] F. Aprilia, M. I. Saputri, D. Damayanti, R. Roviah, and R. G. Mais, “Optimalisasi Penerapan Sak Entitas Privat Pada Laporan Keuangan Pt Xyz,” *L. J.*, vol. 6, no. 1, pp. 232–241, 2025, doi: 10.47491/landjournal.v6i1.3809.
- [12] N. M. Khairiyah, D. H. Sari, and Ramli, “Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) Pada Laporan Keuangan Koperasi CNS SEIKO : Journal of Management & Business Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) Pada Laporan Keuangan Koperasi CNS,” *SEIKO J. Manag. Bus.*, vol. 7, no. 1, pp. 689–698, 2024.
- [13] E. D. Kartika, A. Bahari, and E. Luthan, “Improving Audit Quality with Risk-Based Approach and Quality of Independent Audit Using the Structure Equation Modeling Evidence West Sumatra,” *Int. J. Ind. Manag.*, vol. 19, no. 3, pp. 129–146, 2025.
- [14] R. Maisyarah and M. E. Syari, “Literature Review: Risk-Based Audit Approach in Operational Auditing in Indonesian Islamic Banking Companies,” *Asian J. Manag. Anal.*, vol. 4, no. 3, pp. 1313–1326, 2025, doi: 10.55927/ajma.v4i3.15079.
- [15] S. M. Qubro and A. Islamudin, “Peran Spesialisasi Industri Auditor dalam Meningkatkan Kualitas Audit Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Abc,” *J. Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 5, no. 3, pp. 107–125, 2025, doi: <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i3.5789>.
- [16] A. Munthe, C. Mahulae, and I. Muda, “Risk-Based Information System Audit: A Literature Review and Its Implications in Accounting,” *Indones. Econ. J.*, vol. 1, no. 2, pp. 1416–1424, 2025.